

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
CIAMIS 2007-2013**

MUHAMMAD SIDIK SURYADI

8105112303



**Skripsi Ini Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mendapatkan
Gelar Sarjana Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2015**

TAX EFFECT OF HOTEL AND RESTAURANT TAX REVENUE DISTRICT 2007-2013 CIAMIS

MUHAMMAD SIDIK SURYADI
8105112303



**This thesis Written To Meet One Of Terms Getting a Bachelor of Education At
the Faculty of Economics, University of Jakarta**

**CONCENTRATION OF EDUCATION ECONOMIC
COOPERATION
ECONOMIC EDUCATION STUDY PROGRAM
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2015**

ABSTRAK

Muhammad Sidik Suryadi. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007-2013*. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pajak hotel dan pajak restoran memiliki kontribusi dan pengaruh serta bagaimana nilai multipliernya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis tahun 2007-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *Time Series* dari tahun 2007-2013 dan *Cross Section* berjumlah 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis, dengan metode *deskriptif*. Data di sajikan setiap tahun yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Penelitian ini menggunakan model persentase share/kontribusi. Berdasarkan hasil analisis secara kontribusi, pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh dan berkontribusi minimum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil analisis secara multilier, nilai besaran yang dihasilkan oleh pajak hotel dan restoran memiliki nilai besaran yang berbeda dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran dan selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian.

Kata Kunci : *pajak hotel, pajak restoran, Pendapatan Asli Daerah*.

ABSTRACT

Muhammad Sidik Suryadi. Effect of hotel tax and restaurant tax Against Local Revenue Ciamis Regency Year 2007-2013. Cooperative Economics Education, Economics and Administration, Faculty of Economics, University of Jakarta, in 2015.

This study aims to determine whether the hotel tax and restaurant tax contribution and multiplier effect and how the value of the regional revenue in Ciamis District 2007-2013. The method used in this study is in the form of the 2007-2013 Time Series and Cross Section totaled 7 District in Ciamis, with descriptive method. The data presented each year obtained from BPS (Central Bureau of Statistics). This study uses a model persentaseshare / contributions. Based on the analysis in contributions, hotel tax and restaurant tax effect and minimum contribution to regional revenue in Ciamis District. Based on the results of the analysis multilier, the value of the amount of tax generated by the hotel and restaurant has a value of different magnitudes with the original pendaatan Ciamis regency. Regional Income taxes are influenced by hotel and restaurant taxes and the rest influenced by other factors outside the research model.

Keywords: hotel tax, restaurant tax, regional revenue.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Dedi Purwana, E.S., M.Bus.
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Karuniana Dianta A.S, S.IP, M.E NIP. 19800924 200812 1 002	Ketua		31/07/2015
2. Herlitah, S.sos, M.Ec, Dev NIP. 198401062014042002	Sekretaris		31/07/2015
3. Dr. Harya Kuncara W, SE, M.Si NIP. 197002072008121001	Penguji Ahli		31/07/2015
4. Dr. Saparrudin M, SE, M.Si NIP. 197701152005011001	Pembimbing I		31/07/2015
5. Dicky Iranto, SE, M.SE NIP. 19710612 200112 1 001	Pembimbing II		31/07/2015

Tanggal Lulus: 10 Juli 2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan Karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 24 Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Sidik Suryadi

NIM. 8105112303

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ... “

Al Baqarah ayat 286

“ It’s about a dedication and a passion, whatever the result “

Manchester United

“ Terimakasih untuk Ayah dan Ibu serta Kakak – kakak ku atas segala doa dan dukungannya yang tak terbatas “

“ Terimakasih untuk semua Dosen yang terkait atas saran dan bimbingannya yang sabar “

“ Terimakasih untuk semua teman ekop reg & nonreg, teman UNJ, pasukan Gunadarma, teman rumah serta kosan yang selalu memberikan hiburan dan dukungannya”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis 2007-2013”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ekonomi & Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyusun laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Saparuddin M, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dicky Iranto, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Busselaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Bapak Drs. Nurdin Hidayat MM, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi & Administrasi.
5. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.

6. Bapak Karuniana Dianta AS Sebayang, S.IP, ME selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi.
7. Kedua orang tua saya, Sarman dan Amini, yang telah memberikan cinta, kasih, sayangnya serta dukungan doa dan semangat tiada henti untuk saya.
8. Keempat kakak-kakak saya Diah Budiarti, Anang Yulianto, Imam Wahyudi, Ade Kurniawan yang selalu memberikan saya kasih sayang, cinta, perhatian dan motivasinya.
9. Sahabat, teman *share* dan diskusi yang setia, Nurlaila Umroh, Desta Dwi Putranto, Finsa Sioloan Manullang, Arif Tri Wahyudi, Abdul Sohib, Iqbal Tawakkal, Mutia Sari, Aulia Rifky Afif, Firmansyah, Jordy Setiawan, Jecko, Resha Ariesena, Raisha, Muhammad Irfan, Abdul Latif, Bintun Nahdiah, Kang Mus kalian semua luar biasa.
10. Om Duta, Om Erros, Om Adam, Om Brian atas lagu-lagunya yang menemani sepanjang perjuangan.
11. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Ekop Reguler 2011 serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan masukan serta doa yang selalu diberikan kepada saya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun karya tulis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Jakarta, 30 Juni 2015

Muhammad Sidik Suryadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iiI
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Pembatasan Masalah	15
D. Perumusan Masalah.....	15
E. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II. KAJIAN TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual.....	17
1. Pendapatan Asli Daerah.....	17
2. Pajak Daerah.....	19
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	27
C. Kerangka Teoretik	29
D. Perumusan Hipotesis	30
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	31
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	31
C. Metode Penelitian	31

D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	36
1. Pendapatan Asli Daerah	
a. Definisi Konseptual	36
b. Definisi Operasional	37
2. Pajak Daerah sektor Pajak Hotel	
a. Definisi Konseptual	37
b. Definisi Operasional	37
3. Pajak Daerah sektor Pajak Restoran	
a. Definisi Konseptual	37
b. Definisi Operasional	37
G. Metode Analisis Data.....	38
a. Model Alat Kontribusi	38
b. Multiplier.....	40

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data	41
B. Pengujian Hipotesis	46
a) Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD	46
b) Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD	47
c) Nilai Multiplier Pajak Hotel terhadap PAD	48
d) Nilai Multiplier Pajak Restoran terhadap PAD	49
C. Pembahasan	50
D. Keterbatasan Penelitian	51

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
I.1	Data total PAD Kabupaten Ciamis 2007-2013	7
I.2	Data PAD 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013.....	7
I. 3	Data pajak hotel 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013	8
1.4	Data total pajak hotel Kabupaten Ciamis 2007-2013.....	8
1.5	Data pajak restoran 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013....	9
1.6	Data total pajak restoran Kabupaten Ciamis 20072013	9
1.7	Data total rata-rata penerimaan pajak daerah Kabupaten Ciamis 2007-2013	10
IV.1	Data total PAD Kabupaten Ciamis 2007-2013	41
IV.2	Data PAD 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013.....	42
IV. 3	Data pajak hotel 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013	43
1V.4	Data total pajak hotel Kabupaten Ciamis 2007-2013.....	43
1V.5	Data pajak restoran 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013....	44
1V.6	Data total pajak restoran Kabupaten Ciamis 20072013	44
1V.7	Data total rata-rata penerimaan pajak daerah Kabupaten Ciamis 2007-2013	45
1V.8	Kontribusi total pajak hotel terhadap total PAD Kabupaten Ciamis 2007- 2013	46
1V.9	Kontribusi total pajak restoran terhadap total PAD Kabupaten Ciamis 2007-2013	47
1V.10	Nilai Multiplier total pajak hotel terhadap total PAD Kabupaten Ciamis 2007-2013	48
1V.11	Nilai Multiplier total pajak restoran terhadap total PAD Kabupaten Ciamis 2007-2013	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
-		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; fungsi distribusi yang meliputi, antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya.

Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda dari masing-masing wilayah. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah secara jelas dan tegas. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kewenangan diberikan pada pemerintah daerah, kecuali untuk lima hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu pembiayaan bagi politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta kewajiban pengembalian pinjaman pemerintah pusat.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba badan usaha milik daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Penjelasan tentang sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah otonom di atas mengisyaratkan bahwa daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan sendiri secara optimal, sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat tidak terlalu tinggi. Ini artinya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan pembangunan harus bisa menjadi sumber pembiayaan terbesar.

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan membentangkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu pembelajaran bagi masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep ekonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan oleh kita semua.

Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan

tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah tentu daerah membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit guna menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber – sumber pendapatan daerah yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari :
 - 1. Hasil pajak daerah
 - 2. Hasil retribusi daerah
 - 3. Hasil pengelolaan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang lain
- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pembentukan pemekaran wilayah daerah kabupaten/kota bertujuan untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami tentang kebutuhan masyarakat setempat yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator penting keberhasilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Semakin besar PAD dalam APBD semakin mandiri daerah otonom tersebut.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang perekonomiannya dari tahun ke tahun secara umum didominasi oleh kegiatan primer, yang terdiri dari sektor pertanian dan perikanan dan kegiatan sekunder yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa.

Kabupaten Ciamis adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Ciamis. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kunungan di utara Kabupaten Cilacap dan Kota Banjar di timur, Samudera Hindia di selatan, serta kabupaten Tasikmalaya di barat

Kabupaten Ciamis terdiri dari 30 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan dengan pusat pemerintahan di kecamatan Ciamis. Kecamatan Banjar yang dulunya bagian dari Kabupaten Ciamis, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 11 Desember 2002 menjadi daerah otonom sendiri, yang terpisah dari Kabupaten Ciamis. Selain itu bagian Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran pada tanggal 25 Oktober 2012 menjadi Kabupaten Pangandaran yang memiliki 10 Kecamatan.

Persoalan PAD di Kabupaten Ciamis memberikan dampak terhadap masyarakat, dimana Kabupaten Ciamis. Penanganan terhadap realisasi PAD masih banyak tersendat, seperti anggaran dana yang kurang terdistribusi dengan merata, masalah penduduk, fluktuatif dan lain-lain.

Kesenjangan distribusi pendapatan yang besar pun membuat kemiskinan tidak merata menurut Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat

Agung Laksono bahwa tingkat kemiskinan dan disparitas antarprovinsi masih besar. Masih banyak daerah di Indonesia yang tingkat kemiskinannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Penduduk miskin masih terkonsentrasi di pedesaan.¹ Ini diakibatkan oleh cukup jauhnya perbedaan tingkat distribusi pendapatan.

Salah satu permasalahan penting dalam pembangunan adalah masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang banyak merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan apabila diimbangi oleh kualitas yang baik, namun sebaliknya apabila kualitasnya rendah maka akan menjadi beban bagi pemerintah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ciamis sesuai dengan tahun 2011 jumlah penduduknya telah mencapai 1.774.032 jiwa dengan rincian jumlah penduduk lelaki 889.918 jiwa, perempuan 884.114 jiwa jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 6,0%. Adapun permasalahan yang mempengaruhi variabel-variabel khususnya PAD Kabupaten Ciamis yang ditinjau hasil pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah :

¹<http://www.tempo.com>, Angka Kemiskinan Cuman Turun 0,7 Persen, Jakarta, 08.01.2013, diunduh 25 maret 2013

Tabel 1.1**Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (jutaan rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah	PAD Lain	Total PAD
2007	5.477	23.390	1.094	24.749	54.711
2008	6.882	27.212	1.387	11.365	46.847
2009	8.188	35.167	1.841	6.078	51.276
2010	8.148	30.786	2.311	9.267	50.512
2011	12.312	35.248	2.368	8.970	58.900
2012	17.853	32.216	1.867	7.594	59.530
2013	17.370	31.834	1.396	7.489	58.089

Tabel I.1 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 1.2**PAD 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (jutaan rupiah)**

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	4.412	4.146	4.316	4.211	4.489	4.012	4.251
Pangandaran	14.562	14.418	14.517	15.395	15.581	15.715	15.619
Banjarsari	3.864	3.693	3.810	3.690	3.862	3.791	3.975
Ciamis	9.261	9.765	9.782	10.914	10.951	10.015	10.215
Panjalu	4.156	3.915	4.065	4.104	4.062	4.181	4.016
Sindangkasih	5.163	5.075	5.314	5.064	5.492	5.371	5.262
Sukadana	4.975	4.461	4.477	4.206	4.061	4.017	4.190

Tabel 1.2 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terjadi fluakuatif di semua faktor yang mempengaruhi PAD, serta tren penurunan 2 tahun terakhir.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu dari tahun 2007 s.d. 2013, pajak daerah yang diteliti adalah perolehan pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah sebesar 10%, Pajak Hotel Kabupaten Ciamis cenderung mengalami peningkatan, tetapi ada juga tren penurunan seperti tabel dibawah :

Tabel 1.3

Pajak Hotel 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (ribuan rupiah)

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	50.176	58.533	68.533	89.453	82.973	94.986	91.123
Pangandaran	380.013	450.246	510.269	880.154	620.102	850.795	1.223.421
Banjarsari	60.878	70.612	78.620	82.460	81.960	89.120	84.341
Ciamis	220.714	302.755	382.509	422.459	420.324	550.453	721.714
Panjalu	45.518	52.178	59.875	55.855	52.557	68.742	89.897
Sindangkasih	42.903	49.832	57.940	50.530	50.825	62.721	73.124
Sukadana	40.572	48.804	58.324	55.274	55.464	67.734	82.983

Tabel I.3 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Tabel 1.4

Total Pajak Hotel Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Hotel (rupiah)
2007	1.000.527.451
2008	1.500.311.508
2009	2.165.941.801
2010	1.854.104.374
2011	3.872.308.584
2012	4.298.651.462
2013	4.851.124.572

Tabel I.4 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada tahun 2008 pajak hotel Kabupaten Ciamis meningkat dari tahun 2007 hingga 500 jutaan rupiah hal ini disebabkan oleh pembangunan hotel disekitaran area perkotaan, kemudian meningkat hingga 300 jutaan rupiah pada 2009 dan mengalami penurunan pada 2010 oleh alokasi lahan hotel-hotel lama menjadi taman-taman kota dan bangunan lain hingga penurunan mencapai 5 jutaan rupiah, peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2011 sebesar 2

miliar rupiah, pembangunan hotel di area wisata meningkat tajam menjadi penyebabnya. Dua tahun terakhir mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan. Rata-rata penerimaan sektor ini mencapai Rp. 2.784.709.857

Pajak Restoran

Tabel 1.5

Pajak Restoran 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (ribuan rupiah)

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	58.921	50.412	69.531	82.456	89.844	94.341	99.624
Pangandaran	370.513	420.156	540.241	660.541	910.821	890.451	1.323.241
Banjarsari	61.472	75.324	81.523	80.031	90.831	89.120	84.930
Ciamis	210.434	310.321	375.501	492.124	452.523	590.823	751.512
Panjalu	46.731	53.431	55.513	52.453	62.421	61.531	92.421
Sindangkasih	45.124	51.803	57.910	55.451	50.462	63.124	75.432
Sukadana	44.124	49.812	59.344	56.221	55.424	65.234	85.123

Tabel 1.5 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Tabel 1.6

Total Pajak Restoran Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Restoran (rupiah)
2007	1.123.748.822
2008	1.604.123.190
2009	2.401.237.242
2010	1.950.732.123
2011	4.078.572.123
2012	4.498.321.511
2013	4.801.112.345

Tabel 1.6 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Pajak restoran di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan pada tahun 2008 dari tahun sebelumnya sebesar 500 jutaan rupiah dikarenakan penurunan kunjungan konsumen, pada 2009 mengalami peningkatan cukup signifikan hingga hampir 1 miliar rupiah diakibatkan pembangunan restoran di daerah perkotaan Kabupaten Ciamis, tren penurunan kembali terjadi pada tahun 2010

sebesar 500 jutaan rupiah, angka penurunan kunjungan konsumen menjadi penyebab utamanya, pada 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan sangat signifikan hingga 2 miliar rupiah lebih dengan menjamurnya restoran-restoran di area wisata. Rata-rata penerimaan pada sektor pajak restoran mencapai Rp. 2.922.549.571

Sedangkan dari semua pajak daerah yang masuk untuk PAD Kabupaten Ciamis yang berasal dari Pajak Hotel dan Restoran yang rata-ratanya mencapai Rp 2.878.629.714 atau 37,7% dari seluruh penerimaan pajak daerah selama kurun waktu tersebut.

Total rata-rata penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis-jenis yang meliputi pajak daerah, seperti pajak hotel dan restoran, pajak reklame, dll :

Tabel 1.7

Total Rata-rata Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ciamis

Tahun 2007 s.d. 2013

No	Pajak Daerah	Rata-Rata Dalam Rp	Rata-Rata dalam %
1	Pajak Hotel dan Restoran	2.903.629.714	37,7
2	Pajak Hiburan	4.752.588.220	54,08
3	Pajak Reklame	348.993.710	5,351
4	Pajak Penerangan Jalan	93.043.000	1,260
5	Pajak Bahan Galian Gol C	14.518.010	0,280
6	Pajak ABT dan AP	46.361.379	0,628
7	Pajak Parkir	103.470.900	1,290
8	Tunggakan Pajak	17.485.780	0,212
9	Denda Pajak	49.000	0,000
Total		7.653.128.619	100,000

Tabel I.7 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Sesuai dengan prinsip ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Untuk pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah masing-masing guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan daerah tetap berjalan, akan tetapi bukan berarti setiap pemerintahan daerah otonom harus membiayai keseluruhan keperluan dari PAD.

Berdasarkan semua data yang berhasil diperoleh peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjawab permasalahan kuncinya yaitu :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah ?
2. Sejauh mana pengaruh sektor pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
3. Sejauh mana pengaruh sektor pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

Kenyataan yang sekarang terjadi adalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (*coverty trap*), deprivasi (*social deprivation*), isolasi dan ketidakberdayaan dan ketiadaan akses kepada sumber daya alam, sarana dan

prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan (Chambers 1983)². Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dimana tujuannya adalah ingin memecahkan konsep Pendapatan Asli Daerah berdasarkan sumber daya alam.

Banyak para ahli yang memprediksikan pertumbuhan ekonomi Ciamis akan mengalami keguncangan dan sulit bangkit terutama daerah Pangandaran pasca bencana alam Tsunami. Apalagi disaat yang bersamaan terjadi juga bencana alam di pelosok negeri ini. Perhatian pemerintah pun terbelah dan banyak juga dana bantuan dan daya tersedot habis ke Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dsb³.

Ekonomi Ciamis sudah jelas, membangun kembali ekonomi disana membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit. Mata rantai ekonomi yang terputus dibagian akhir, harus dibangun kembali dengan motivasi yang tinggi. Kalau tidak pembangunan ekonomi Ciamis akan tertatih dan menyedihkan bagi masyarakat disana. Mata rantai ekonomi yang paling akhir yakni, pemasaran. Itulah yang dibangun. Produksi, distribusi, relatif tidak terganggu⁴. Produksi yang terganggu paling hanya nelayan (produksi ikan) itupun hanya sebentar, saat ini para nelayan di Pangandaran sudah berani melaut kembali. Yang mungkin agak lama adalah mengembalikan image masyarakat penggemar pantai (turis) menghapus bayang-bayang tsunami Pangandaran. Padahal, segmen ini merupakan pasar potensial sekali⁵.

²*Rural Development : Putting The Last First*, Robert Chambers 1983; *Rural Appraisal Rapid, Relaxed, and Participatory* (1992) dan *Whose Voice Counts?: Putting The First Last*, Robert Chambers, 1997.

³ [http : www.mypangandaran.com/](http://www.mypangandaran.com/)

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

Peneliti agak bersebrangan dengan pendapat-pendapat yang selama ini mengemuka bahwa pembangunan ekonomi Pangandaran, relatif sulit bangkit atau dengan kata lain, ekonomi Pangandaran dalam waktu dekat perlu dibantu secara terus menerus ⁶.

Dari data-data yang peneliti punyai, justru Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang tingkat penganggurannya relati rendah. Bahkan Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten yang paling rendah tingkat penganggurannya di Jawa Barat. Kabupaten Ciamis dan merupakan yang paling tinggi tingkat pastisipasi angkatan kerja wanitanya⁷.

Kabupaten Ciamis ekonominya bertumbuh pada potensi-potensi kekayaan alam daerah yang dibantu dengan sektor UKM. dan berkembangnya UKM disini didukung berbagai data silang, baik Perum Pegadaian, Bapeda Jawa Barat, dan data – data yang dikemukakan oleh Kantor Sensus dan Statistik⁸.

Efek multiplier berdampak sangat signifikan terhadap pembangunan daerah Ciamis. Disinilah diparsitas pendapatan atau gap (jurang pemisah) antara yang kaya dan miskin relatif kecil. Tidak seperti pembangunan dibelahan Jawa Barat yang lain yang didukung oleh industri padat modal, pengiriman TKI ke luar negeri atau ekonomi perkotaan yang tumbuh oleh perdagangan modern.

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

Dengan melalui pendekatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis dengan melalui seberapa pentingnya dan sadarnya mereka akan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan baru-baru ini yang pernah dilontarkan oleh Presiden Jokowi, dimana Indonesia akan terus berusaha mengembangkan dan menjaga kelautan dan kemaritiman yang kita punya untuk membantu perekonomian nasional dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan dan berkurangnya angka kemiskinan. Keterkaitan hasil pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah akan meningkatkan tingkat pendapatan asli suatu daerah dan menurunkan angka kemiskinan, baik dalam ruang lingkup lokal maupun nasional.

Dengan penjelasan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk membahas tentang Pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah dengan pesisir yang mempunyai potensi untuk berkembang.

Penelitian dilakukan pada kelompok masyarakat daerah Kabupaten Ciamis yang merupakan salah satu kabupaten pesisir potensial di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diambil dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
2. Pengaruh pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Ciamis

3. Pengaruh sumber daya manusia terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
4. Pengaruh sumber daya alam terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
5. Pengaruh Pungutan Pajak terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
6. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
7. Pengaruh kesadaran masyarakat dan keamanan terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
8. Pengaruh kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD di Kabupaten Ciamis
9. Pengaruh PAD yg lain-lain terhadap PAD di Kabupaten Ciamis

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, ternyata masalah tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung dengan adanya dugaan saling keterkaitan yang erat antar entitas tersebut, maka peneliti membatasi ruang lingkup dengan meneliti hasil pajak daerah, dengan pengaruh pajak hotel dan restoran sebagai faktor yang mempengaruhi (determinan) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan pembatasan masalah yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: “Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoretis maupun empiris mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi mengenai pengaruh faktor-faktor atau variabel-variabel ekonomi makro terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat digunakan juga sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor lainnya atau variable-variabel lainnya dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan di bagian data Badan Pusat Statistik Indonesia diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah mengenai opsi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Pendapatan Asli Daerah

Wahyu Adji (2004: 3) mengatakan bahwa “pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension”.

Menurut Yuliana Sudremi (2007: 133) “pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi”

Sedangkan Suyanto (2000: 80) mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

“ Pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi:

- 1) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
- 2) Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
- 3) Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham.
- 4) Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, bertenak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima selama periode tertentu dari balas jasa dari perusahaan yang bisa berupa bentuk gaji, upah, tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Para perintis ilmu ekonomi, membagi masyarakat atas tiga kategori , yaitu kaum

pekerja (dan petani), para pengusaha atau katalis (kelas menengah) dan para tuan tanah⁹.

Menurut Halim (2001) Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri menurut UU No.33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰.

Diberlakukannya otonomi daerah karena adanya intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar terhadap pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam proses pembangunan¹¹. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat¹².

PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah¹³.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum otonomi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat terhadap daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing – masing sesuai dengan kehendak daerah¹⁴.

Dengan perubahan struktur pemerintahan ini, maka pemerintah pusat sebagai penyelenggara kegiatan ekonomi berkewajiban menyediakan barang-barang publik yang manfaatnya dapat dirasakan sangat luas. Untuk barang-barang yang bersifat lokal maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyediakan barang dan jasa tersebut dengan sistem desentralisasi kewenangan¹⁵.

⁹ T.Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro Jilid 2*, (Yogyakarta: Kanisius , 1994), hlm.78.

¹⁰ UU No.33 Tahun 2004

¹¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002), p.3

¹² Ibid, p.99

¹³ Ibid, p 132

¹⁴ Suparmoko, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi 2001), p.9

¹⁵ Ibid, p.33

2. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan utama bagi setiap daerah begitu pula bagi Kabupaten Ciamis di samping pendapatan dari retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum menurut Soemitro di dalam buku Perpajakan yang di tulis oleh Mardiasmo:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁶

Pendapat yang sama juga tentang pajak dikemukakan oleh Mangkoesoebroto, sebagai berikut :

Suatu pungutan yang merupakan progresi pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung ditujukan penggunaannya.¹⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Soemohamidjojo, bahwa :

Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang, jasa kolekti dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁸

Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan mengenai pengertian pajak secara umum, yaitu, pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-undang tentang perpajakan. Oleh karena itu pemungutan pajak dilakukan secara memaksa, apabila ada wajib pajak yang tidak membayar wajib pajak maka akan dikenakan sanksi. Selain itu, pajak dipungut tanpa kontraprestasi secara

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2009), p.1

¹⁷ Nordin. Op.cit. p. 24

¹⁸ Kaho. op.cit. p. 144

langsung dari negara kepada wajib pajak dan hasil pemungutan pajak digunakan untuk mendanai APBN (fungsi budgeter).

Di atas adalah pengertian pajak secara umum, sedangkan untuk pengertian pajak daerah juga telah dikemukakan oleh beberapa para ahli. Menurut Soemitro, “Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja Kabupaten dan sebagainya.”¹⁹

Menurut Erly Sunandy, pajak daerah adalah :

Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²⁰

Sedangkan Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, mengemukakan bahwa :

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.²¹

Dari beberapa pengertian diatas tentang pajak daerah di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pajak daerah, yaitu pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah. Ketentuan mengenai pajak daerah sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pajak pusat, yang berbeda hanyalah ruang lingkup wilayahnya saja.

¹⁹ Kaho, op.cit, p. 144

²⁰ Sunandy, op.cit, p. 242

²¹ Mardiasmo, op.cit, p. 12

Jenis-jeni pajak daerah dan pembagiannya menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian Gol C, Pajak Air Atas Tanah, Pajak Parkir, Tunggakan Pajak, Denda Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Obyek dan Bukan Obyek Pajak Hotel

Obyek pajak hotel termasuk pelayanan menurut Peraturan Daerah Kota Ciamis Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (1) sebagaimana di bawah ini:

1. Gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksmile, teleteks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk obyek pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Ciamis Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (2), yaitu:

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang

dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel; dan Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Peraturan Daerah Kota Ciamis Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 3, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Subyek pajak, di mana konsumen yang menikmati pelayanan hotel dan membayar (menanggung) pajak.

Wajib Pajak dalam Peraturan Daerah Kota Ciamis Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel Dasar pengenaan pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Ciamis

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kota Ciamis, menurut Peraturan Daerah Kota Ciamis

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pada tahun 2011, pemerintah Kota Ciamis mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di mana pada pasal 6 ditetapkan tarif pajak hotel sebagai berikut:

1. Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
3. Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Menurut Siahaan (2010: 305), rumus perhitungan pajak hotel secara umum sebagai berikut:

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Tarif} \times \text{Jumlah}$

Pembayaran atau Yang Seharusnya Dibayar Kepada Hotel

Pajak Restoran

Pajak restoran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang

dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 23 adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak Restoran

Obyek pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 ayat (1) adalah pelayanan disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran dalam ayat 1 tersebut adalah:

1. Restoran, rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya
2. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Pajak Restoran Pasal 2 ayat (2), yang bukan menjadi obyek pajak restoran, yaitu:

- 1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering;
- 2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran/rumah makan yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. di mana yang bukan termasuk obyek pajak restoran adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

Subyek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subyek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran pasal 3 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya.

Wajib Pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran pasal 4 adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran/rumah makan, café, bar dan sejenisnya. Dengan demikian, pada pajak restoran, subyek dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subyek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Ciamis Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kota Ciamis, menurut Peraturan Daerah Kota Ciamis

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Siahaan (2010:305), rumus perhitungan pajak restoran secara umum sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Diterima}$$

atau yang Sebenarnya Diterima Restoran

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan mengenai pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan. Berikut penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Dewi Nurmala Sari yang meneliti tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2013. Hasil penelitian ini bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan lokal variabel yang paling dominan adalah Pajak Daerah ini berarti Pajak Daerah mempengaruhi peningkatan angka pendapatan lokal di Kota Surakarta.

Adelia Shabrina Prameka yang meneliti Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan lokal variabel yang paling dominan adalah Pajak Daerah ini berarti Pajak Daerah mempengaruhi peningkatan angka pendapatan lokal di Indonesia²².

Vidya Paramita meneliti tentang Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung itu sendiri²³.

Arinda Trywilda meneliti tentang Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda²⁴.

²²Adelia Shabrina Prameka yang meneliti Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang

²³Vidya Paramita Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

²⁴Arinda Trywilda Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda

I Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena meneliti tentang Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positi antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar dan mempunyai andil pada pendapatan suatu wilayah²⁵.

C. Kerangka Teoretik

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasi pengelolaan sumber daya alam yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah

Rumus perhitungan pajak hotel secara umum sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif x Jumlah Pembayaran atau Yang Seharusnya Dibayar Kepada Hotel

Rumus perhitungan pajak restoran secara umum sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Terutang = Tarif Pajak × Jumlah Pembayaran yang Diterima atau yang Sebenarnya Diterima Restoran

Dari kerangka berpikir dan pandangan diatas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa jika suatu hasil pengolahan faktor produksi meningkat maka Pendapatan Asli Daerah suatu daerah pun akan ikut meningkat. Tetapi untuk subsektor seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang akan diteliti

²⁵I Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012

menunjukkan adanya probabilistik, dimana ketika Pajak Hotel dan Pajak Restoran meningkat belum tentu Pendapatan Asli Daerah tersebut ikut meningkat dan sebaliknya. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya bukan hanya dari kedua subfaktor tersebut. .

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis bahwa :

Terdapat hubungan kemungkinan positif antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah, tingginya Pajak Hotel dan Pajak Restoran peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat, valid, dan dapat dipercaya (dapat diandalkan atau reliable), tentang pengaruh antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis pada tahun 2007-2013.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ciamis. Data sumber daya alam, dan tingkat pendapatan di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia karena BPS yang mengeluarkan data-data tersebut untuk Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2015. Pemilihan waktu ini dipilih karena dianggap efektif oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

C. Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menekankan dan menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan apa adanya. Penelitian

deskriptif juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.

Dengan penelitian metode deskriptif, memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.

Di samping kedua alasan tersebut di atas, penelitian deskriptif pada umumnya menarik bagi para peneliti muda, karena bentuknya sangat sederhana dengan mudah dipahami tanpa perlu memerlukan teknik statistika yang kompleks. Walaupun sebenarnya tidak demikian kenyataannya. Karena penelitian ini sebenarnya juga dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih

kompleks, misalnya dalam penelitian penggambaran secara faktual perkembangan sekolah, kelompok anak, maupun perkembangan individual. Penelitian deskriptif juga dapat dikembangkan ke arah penelitian naturalistic yang menggunakan kasus yang spesifik melalui deskriptif mendalam atau dengan penelitian seting alami fenomenologis dan dilaporkan secara thick description (deskripsi mendalam) atau dalam penelitian ex-postfacto dengan hubungan antarvariabel yang lebih kompleks.

Penelitian deskriptif yang baik sebenarnya memiliki proses dan sadar yang sama seperti penelitian kuantitatif lainnya. Disamping itu, penelitian ini juga memerlukan tindakan yang teliti pada setiap komponennya agar dapat menggambarkan subjek atau objek yang diteliti mendekati kebenarannya. Sebagai contoh, tujuan harus diuraikan secara jelas, permasalahan yang diteliti signifikan, variabel penelitian dapat diukur, teknik sampling harus ditentukan secara hati-hati, dan hubungan atau komparasi yang tepat perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran objek atau subjek yang diteliti secara lengkap dan benar.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi variabel dan tidak menetapkan peristiwa yang akan terjadi, dan biasanya menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Dengan penelitian deskriptif, memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hubungan variabel atau asosiasi, dan juga mencari hubungan komparasi antar variabel.

Keunikan yang ada pada metode penelitian deskriptif antara lain seperti berikut:

1. Penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dan wawancara, seringkali memperoleh responden yang sangat sedikit, akibatnya bias dalam membuat kesimpulan.
2. Penelitian deskriptif yang menggunakan observasi, terkadang dalam pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai. Untuk itu diperlukan para observer yang terlatih dalam observasi, dan jika perlu membuat check list lebih dahulu tentang objek yang perlu dilihat, sehingga peneliti memperoleh data yang diinginkan secara objektif dan reliable.
3. Penelitian deskriptif juga membutuhkan permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan dengan jelas, agar peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menjangkau data ketika di lapangan.

Dengan pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data dengan presentase/share/kontribusi. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pembahasan empiris, yaitu penelitian berdasarkan informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak hotel, restoran, terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang menjadi objek penelitian dimana

PAD merupakan variabel terikat (Y). Sedangkan variabel bebas adalah pajak hotel (X1), pajak restoran (X2)

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data *time series* periode 7 tahun (2007-2013) dan *cross section* 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan dan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan PAD Kabupaten Ciamis periode 2007-2013, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder tersebut diperoleh dari sumber-sumber seperti catatan atau laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

E. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dipergunakan data adalah riset kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mengumpulkan data sekunder yang berada di pusat referensi di BPS dan juga literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai landasan teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

berbagai literatur yang berupa jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah.

2. Observasi

Studi ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yaitu BPS Pusat dan BPS Kabupaten Ciamis untuk memperoleh data-data pajak hotel, pajak restoran, dan PAD.

3. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengolah data berupa dokumen yang diperoleh dari BPS Pusat dan BPS Kabupaten Ciamis.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pengukuran variabel-variabel penelitian. Operasionalisasi variabel untuk menentukan jenis indikator, serta skala dan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian.

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

a. Definisi Konseptual

PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .

b. Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diteliti sumber daya alam terhadap PAD di Kabupaten Ciamis dan setiap data diperoleh berdasarkan data pada periode tahun 2010 hingga periode tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia .

2. Pajak Daerah sektor Pajak Hotel (X1)

a. Definisi Konseptual

Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Definisi Operasional

Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas segala barang dan jasa hotel.

3. Pajak Daerah sektor Pajak Restoran (X2)

a. Definisi Konseptual

Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Definisi Operasional

Iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas segala barang dan jasa restoran.

G. Metode Analisis Data

a. Model Alat Kontribusi

Metode analisis data yang digunakan untuk pengujian ini adalah alat kontribusi. Alat kontribusi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{P}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, terhadap PAD Kabupaten Ciamis

N = Realisasi PAD untuk satu tahun anggaran

Analisis Data

Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak daerah berkontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang bersal dari Pajak Kabupaten/Kota diantaranya pajak hotel, restoran sebagai sumber pembiayaan

pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas peningkatan penerimaan pajak hotel, restoran terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan/realisasi yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Untuk menghitung kontribusi pajak hotel, pajak restoran terhadap PAD, dengan menggunakan rumus :

a) Kontribusi pajak hotel terhadap PAD

Analisis kontribusi adalah suatu alat untuk menghitung kontribusi pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran) dengan penerimaan PAD. Suatu analisis yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran) dengan penerimaan PAD. Kontribusi pajak daerah khususnya pajak hotel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{ph}{N} \times 100\%$$

Ph : Pajak Hotel

N : PAD

b) Kontribusi pajak restoran terhadap PAD

Analisis kontribusi adalah suatu alat untuk menghitung kontribusi pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran) dengan penerimaan PAD. Suatu analisis yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran) dengan penerimaan PAD. Kontribusi pajak daerah khususnya pajak restoran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Pr}{N} \times 100\%$$

Pr : Pajak Restoran

N : PAD

Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran merupakan tahapan peningkatan realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk kesederhanaan bentuk menggunakan tahun dasar sebagai tahun pembandingan yang telah ditentukan. Hal ini digunakan untuk menginformasikan berapa banyak sesuatu hal telah berubah atau bagaimana hal yang satu dibandingkan dengan hal yang lain.

b. Multiplier

Multiplier adalah angka pengganda hubungan kausal antara variabel tertentu dengan variabel pendapatan daerah dalam hal ini. Untuk subsektor seperti pajak hotel dan pajak restoran yang akan diteliti menunjukkan adanya probabilistik, dimana ketika pajak hotel dan pajak restoran meningkat belum tentu Pendapatan Asli Daerah tersebut ikut meningkat dan sebaliknya. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya bukan hanya dari kedua subfaktor tersebut dengan asumsi dugaan seperti berikut :

“ Besaran nilai kenaikan/penurunan $\Delta X1$ atau $\Delta X2 \neq$ besaran kenaikan/penurunan nilai ΔY “

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

Deskripsi data yang dipaparkan dalam tiga bagian sesuai dengan variabel dalam penelitian ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

1. Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini menggunakan data PAD yang di peroleh dari 7 kecamatan di kabupaten Ciamis dari tahun 2007 sampai 2013. Data ini berupa data tahunan masing-masing kecamatan dari kabupaten Ciamis yang dipublikasikan oleh BPS.

Tabel 1.1

Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (jutaan rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah	PAD Lain	Total PAD
2007	5.477	23.390	1.094	24.749	54.711
2008	6.882	27.212	1.387	11.365	46.847
2009	8.188	35.167	1.841	6.078	51.276
2010	8.148	30.786	2.311	9.267	50.512
2011	12.312	35.248	2.368	8.970	58.900
2012	17.853	32.216	1.867	7.594	59.530
2013	17.370	31.834	1.396	7.489	58.089

Tabel I.1 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 1.2**PAD 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (jutaan rupiah)**

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	4.412	4.146	4.316	4.211	4.489	4.012	4.251
Pangandaran	14.562	14.418	14.517	15.395	15.581	15.715	15.619
Banjarsari	3.864	3.693	3.810	3.690	3.862	3.791	3.975
Ciamis	9.261	9.765	9.782	10.914	10.951	10.015	10.215
Panjalu	4.156	3.915	4.065	4.104	4.062	4.181	4.016
Sindangkasih	5.163	5.075	5.314	5.064	5.492	5.371	5.262
Sukadana	4.975	4.461	4.477	4.206	4.061	4.017	4.190

Tabel 1.2 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terjadi fluakuatif di semua faktor yang mempengaruhi PAD, serta tren penurunan 2 tahun terakhir.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu dari tahun 2007 s.d. 2013, pajak daerah yang diteliti adalah perolehan pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah sebesar 10%, Pajak Hotel Kabupaten Ciamis cenderung mengalami peningkatan, tetapi ada juga tren penurunan seperti tabel dibawah :

Tabel 1.3**Pajak Hotel 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (ribuan rupiah)**

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	50.176	58.533	68.533	89.453	82.973	94.986	91.123
Pangandaran	380.013	450.246	510.269	880.154	620.102	850.795	1.223.421
Banjarsari	60.878	70.612	78.620	82.460	81.960	89.120	84.341
Ciamis	220.714	302.755	382.509	422.459	420.324	550.453	721.714
Panjalu	45.518	52.178	59.875	55.855	52.557	68.742	89.897
Sindangkasih	42.903	49.832	57.940	50.530	50.825	62.721	73.124
Sukadana	40.572	48.804	58.324	55.274	55.464	67.734	82.983

Tabel I.3 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Tabel 1.4**Total Pajak Hotel Kabupaten Ciamis 2007-2013**

Tahun	Pajak Hotel (rupiah)
2007	1.000.527.451
2008	1.500.311.508
2009	2.165.941.801
2010	1.854.104.374
2011	3.872.308.584
2012	4.298.651.462
2013	4.851.124.572

Tabel I.4 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada tahun 2008 pajak hotel Kabupaten Ciamis meningkat dari tahun 2007 hingga 500 jutaan rupiah hal ini disebabkan oleh pembangunan hotel disekitaran area perkotaan, kemudian meningkat hingga 300 jutaan rupiah pada 2009 dan mengalami penurunan pada 2010 oleh alokasi lahan hotel-hotel lama menjadi taman-taman kota dan bangunan lain hingga penurunan mencapai 5 jutaan rupiah, peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2011 sebesar 2 miliar rupiah, pembangunan hotel di area wisata meningkat tajam menjadi penyebabnya. Dua tahun terakhir mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan. Rata-rata penerimaan sektor ini mencapai Rp. 2.784.709.857

Pajak Restoran

Tabel 1.5

Pajak Restoran 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013 (ribuan rupiah)

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	58.921	50.412	69.531	82.456	89.844	94.341	99.624
Pangandaran	370.513	420.156	540.241	660.541	910.821	890.451	1.323.241
Banjarsari	61.472	75.324	81.523	80.031	90.831	89.120	84.930
Ciamis	210.434	310.321	375.501	492.124	452.523	590.823	751.512
Panjalu	46.731	53.431	55.513	52.453	62.421	61.531	92.421
Sindangkasih	45.124	51.803	57.910	55.451	50.462	63.124	75.432
Sukadana	44.124	49.812	59.344	56.221	55.424	65.234	85.123

Tabel 1.5 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis

Tabel 1.6

Total Pajak Restoran Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Restoran (rupiah)
2007	1.123.748.822
2008	1.604.123.190
2009	2.401.237.242
2010	1.950.732.123
2011	4.078.572.123
2012	4.498.321.511
2013	4.801.112.345

Tabel 1.6 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Pajak restoran di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan pada tahun 2008 dari tahun sebelumnya sebesar 500 jutaan rupiah dikarenakan penurunan kunjungan konsumen, pada 2009 mengalami peningkatan cukup signifikan hingga hampir 1 miliar rupiah diakibatkan pembangunan restoran di daerah perkotaan Kabupaten Ciamis, tren penurunan kembali terjadi pada tahun 2010 sebesar 500 jutaan rupiah, angka penurunan kunjungan konsumen menjadi penyebab utamanya, pada 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan sangat signifikan hingga 2 miliar rupiah lebih dengan menjamurnya restoran-restoran

di area wisata. Rata-rata penerimaan pada sektor pajak restoran mencapai Rp. 2.922.549.571

Sedangkan dari semua pajak daerah yang masuk untuk PAD Kabupaten Ciamis yang berasal dari Pajak Hotel dan Restoran yang rata-ratanya mencapai Rp 2.878.629.714 atau 37,7% dari seluruh penerimaan pajak daerah selama kurun waktu tersebut.

Tabel 1.7

Total Rata-rata Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ciamis

Tahun 2007 s.d. 2013

No	Pajak Daerah	Rata-Rata Dalam Rp	Rata-Rata dalam %
1	Pajak Hotel dan Restoran	2.878.629.714	37,7
2	Pajak Hiburan	4.152.588.220	54,08
3	Pajak Reklame	348.993.710	5,351
4	Pajak Penerangan Jalan	93.043.000	1,260
5	Pajak Bahan Galian Gol C	14.518.010	0,280
6	Pajak ABT dan AP	46.361.379	0,628
7	Pajak Parkir	103.470.900	1,290
8	Tunggakan Pajak	17.485.780	0,212
9	Denda Pajak	49.000	0,000
Total		7.653.128.619	100,000

Tabel I.7 : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Indonesia

Sesuai dengan prinsip ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam

memobilisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Untuk pemerintah daerah harus dapat menggali potensi daerah masing – masing guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan daerah tetap berjalan, akan tetapi bukan berarti setiap pemerintahan daerah otonom harus membiayai keseluruhan keperluan dari PAD.

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang pertama dilakukan adalah dengan menguji seberapa besar pengaruh kontribusi pajak hotel (x1) dan pajak restoran (x2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (y) secara total di Kabupaten Ciamis periode tahun 2007 hingga 2013 seperti yang didapat dibawah ini :

- a) Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel IV.8

**Kontribusi Total Pajak Hotel terhadap Total PAD Kabupaten
Ciamis 2007=2013**

Tahun	Pajak hotel (rupiah)	Total PAD	Kontribusi (%)
2007	1.000.527.451	54.711.000.000	0,018287501
2008	1.500.311.508	46.847.000.000	0,032025776
2009	2.165.941.801	51.276.000.000	0,04224085
2010	1.854.104.374	50.512.000.000	0,036706216
2011	3.872.308.584	58.900.000.000	0,065743779
2012	4.298.651.462	59.530.000.000	0,072209835
2013	4.851.124.572	58.089.000.000	0,083511931

Untuk tahun 2007 kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,018287501%, kemudian meningkat pada 2008 dengan kontribusi sebesar 0,032025776%, di tahun 2009 hingga 0,04224085%, sedikit mengalami penurunan di 2010 menjadi 0,036706216%, untuk tahun 2011 meningkat kembali sebesar 0,065743779%, dan tahun 2012 sebesar 0,072209835%, hingga pada akhir periode memiliki kontribusi sebesar 0,083511931%. Kontribusi terbesar total pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis ada di tahun 2013 sebesar 0,083511931%, sedangkan yang terendah ada di tahun 2007 sebesar 0,018287501%.

b) Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel IV.9

**Kontribusi Total Pajak Restoran terhadap Total PAD Kabupaten
Ciamis 2007-2013**

Tahun	Pajak restoran (rupiah)	Total PAD (rupiah)	Kontribusi (%)
2007	1.123.748.822	54.711.000.000	0,020539724
2008	1.604.123.190	46.847.000.000	0,034241748
2009	2.401.237.242	51.276.000.000	0,046829652
2010	1.950.732.123	50.512.000.000	0,038619182
2011	4.078.572.123	58.900.000.000	0,069245707
2012	4.498.321.511	59.530.000.000	0,075563943
2013	4.801.112.345	58.089.000.000	0,082650973

Untuk tahun 2007 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 0,020539724%, kemudian meningkat pada 2008 dengan kontribusi sebesar 0,034241748%, setelah itu di tahun 2009 sebesar 0,046829652%, kembali menurun di tahun 2010 sebesar 0,038619182%, di tahun 2011 meingkat di

0,069245707%, dan 2012 hingga 2013 mengalami peningkatan hingga pada akhir periode memiliki kontribusi sebesar 0,082650973%. Kontribusi terbesar untuk total pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah di tahun 2013 sebesar 0,082650973%, sedangkan yang terendah ada di tahun 2007 sebesar 0,020539724%.

Analisis Nilai Multiplier

c) Nilai Multiplier Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk nilai multiplier pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.10

Nilai Multiplier Total Pajak Hotel terhadap Total PAD Kabupaten

Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Hotel (rupiah)	Multiplier	Total PAD
2007	1.000.527.451	-0,063553415	54.711.000.000
2008	1.500.311.508	0,15028907	46.847.000.000
2009	2.165.941.801	0,408164171	51.276.000.000
2010	1.854.104.374	0,240606129	50.512.000.000
2011	3.872.308.584	0,676734727	58.900.000.000
2012	4.298.651.462	-0,383395633	59.530.000.000
2013	4.801.124.572		58.089.000.000

Pada tahun 2007 hingga 2008 pajak hotel mengalami penurunan pada nilai multiplier sebesar -0,063553415%, dengan demikian penurunan pada PAD yang terjadi besaran nilainya tidak sama bisa diduga bisa disebabkan oleh

beberapa variabel atau faktor lain diluar variabel pajak hotel di Kabupaten Ciamis. Untuk nilai multiplier tertinggi pada pajak hotel ada pada tahun 2011 hingga 2012 yakni sebesar 0,676734727%, sedangkan untuk peningkatan multiplier terendahnya yakni -0,383395633% pada tahun 2012 hingga 2013.

Sedangkan untuk menganalisis multiplier pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.11

Nilai Multiplier Total Pajak Restoran terhadap Total PAD Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak restoran (rupiah)	Multiplier (%)	Total PAD (rupiah)
2007	1.123.748.822	-0,0610852	54.711.000.000
2008	1.604.123.190	0,17997608	46.847.000.000
2009	2.401.237.242	0,58966639	51.276.000.000
2010	1.950.732.123	0,25367668	50.512.000.000
2011	4.078.572.123	0,66626887	58.900.000.000
2012	4.498.321.511	-0,2101255	59.530.000.000
2013	4.801.112.345		58.089.000.000

Pada tahun 2007 hingga 2008 pajak restoran mengalami penurunan pada nilai multiplier sebesar -0,0610852%, dengan demikian penurunan pada PAD yang lebih besar dari penurunan variabel pajak restoran dapat diduga disebabkan beberapa variabel atau faktor lain diluar variabel pajak restoran di Kabupaten Ciamis. Untuk nilai multiplier terendah pada pajak restoran ada

pada tahun 2012 hingga 2013 yakni sebesar -0,2101255%, sedangkan untuk peningkatan multiplier tertinggi nya yakni 0,66626887% pada tahun 2012 hingga 2013.

C. Pembahasan

Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak daerah berkontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang bersal dari Pajak Kabupaten/Kota diantaranya pajak hotel, restoran sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas peningkatan penerimaan pajak hotel, restoran terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan/realisasi yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan pada periode waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 terhadap 7 kecamatan di kabupaten Ciamis untuk mengetahui apakah ada pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, peneliti dalam hal ini menggunakan pembahasan empirik yang berarti peneliti tidak memanipulasi

perhitungan dengan aplikasi eviews atau pun SPSS dan metode regresi linear, time cross atau pun panel data. Data empirik yang peneliti dapatkan sesuai apa adanya berdasarkan alat kontribusi yang telah dihitung diatas sesuai dengan asumsi dugaan awal yaitu :

“ Besaran nilai kenaikan/penurunan $\Delta X1$ atau $\Delta X2 \neq$ besaran kenaikan/penurunan nilai ΔY “

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pajak hotel mengalami peningkatan pada nilai multiplier sebesar 0,295231578%, dengan demikian penurunan pada PAD yang terjadi besaran nilainya tidak sama bisa diduga disebabkan oleh beberapa variabel atau faktor lain diluar variabel pajak hotel di Kabupaten Ciamis.

Sedangkan untuk pajak restoran, ketika pajak restoran mengalami penurunan pada nilai multiplier sebesar -0,080195455%, dengan demikian penurunan pada PAD yang lebih besar dari penurunan variabel pajak restoran besarnya tidak sama dapat diduga disebabkan beberapa variabel atau faktor lain diluar variabel pajak restoran di Kabupaten Ciamis

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian, antara lain:

1. Unsur variabel yang mempengaruhi PAD sangat luas, namun peneliti hanya menggunakan dua variabel. Hasil penghitungan yang menyatakan bahwa 39% variabel independen mempengaruhi variabel dependennya dirasakan masih cukup kurang, karena hanya dua dari banyak variabel independen terhadap PAD
2. Peneliti melakukan penelitian dalam jangka waktu yang pendek yaitu jangka waktu 7 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Penelitian hanya dilakukan dalam jangka waktu tersebut karena adanya keterbatasan biaya dan data.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Ciamis dan pajak restoran juga mempengaruhi PAD. Penelitian ini menggunakan alat kontribusi yang terdiri dari 7 kecamatan di Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan, pajak hotel mempunyai nilai besaran multiplier yang berbeda atau tidak sama dengan nilai besaran multiplier pada PAD di Kabupaten Ciamis dan minimnya kontribusi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 hal ini disebabkan kurang galaknya pembangunan hotel di sekitar daerah pariwisata maupun perkotaan dan juga belum optimalnya promosi daerah pariwisata untuk memikat banyak wisatawan.
2. Pajak restoran mempunyai nilai besaran multiplier yang berbeda atau tidak sama dengan nilai besaran multiplier pada PAD di Kabupaten Ciamis dan minimnya kontribusi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 hal ini disebabkan kurang galaknya pembangunan restoran di sekitar daerah pariwisata maupun perkotaan dan juga belum optimalnya promosi daerah pariwisata untuk memikat banyak wisatawan.
3. Pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama mempunyai nilai besaran multiplier yang berbeda atau tidak sama dengan nilai besaran

multiplier pada PAD di Kabupaten Ciamis dan minimnya kontribusi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yang seharusnya pemerintah lokal/daerah bisa meminta partisipasi masyarakat setempat untuk melakukan pembangunan hotel dan restoran di daerah-daerah potensial, hal ini disebabkan kurang galaknya pembangunan restoran di sekitar daerah pariwisata maupun perkotaan dan juga belum optimalnya promosi daerah pariwisata untuk memikat banyak wisatawan.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Pajak hotel memiliki kontribusi positif terhadap PAD di Kabupaten Ciamis. PAD dapat mengalami peningkatan apabila pajak hotel mengalami peningkatan. Pendapatan pajak hotel yang tinggi di suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya PAD. PAD yang semakin tinggi akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
2. Pajak restoran memiliki kontribusi positif terhadap PAD di Kabupaten Ciamis. Meningkatnya pajak restoran akan mengakibatkan meningkatnya PAD. Apabila PAD meningkat maka akan menciptakan masyarakat yang sejahteraan.
3. Pajak hotel dan restoran berkontribusi positif dan memiliki multiplier yang berbeda dengan PAD Kabupaten Ciamis. Peningkatan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya, partisipasi masyarakat daerah sekitar daerah wisata atau kota untuk

mencari daerah yang potensial dilakukan pembangunan, kemudian promosi daerah pariwisata dan keunggulan-keunggulan daerah tersebut demi mendapatkan wisatawan yang lebih banyak lagi.

C. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memperhatikan dan memberikan sanksi kepada restoran dan hotel yang tidak membayar pajak.
2. Pemerintah diharapkan kembali menggalakkan wajib pajak agar semua elemen masyarakat sadar pajak. Dan lebih jauh lagi, pemerintah dapat ikut menggalakkan pembangunan hotel dan restoran di tempat-tempat wisata atau bahkan ditengah kota.
3. Peningkatan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya, partisipasi masyarakat daerah sekitar daerah wisata atau kota untuk mencari daerah yang potensial dilakukan pembangunan, kemudian promosi daerah pariwisata dan keunggulan-keunggulan daerah tersebut demi mendapatkan wisatawan yang lebih banyak lagi

DAFTAR PUSTAKA

- http://www.tempo.com, Angka Kemiskinan Cuman Turun 0,7 Persen, Jakarta, 08.01.2013, diunduh 25 maret
- Rural Development : Putting The Last First*, Robert Chambers 1983; *Rural Appraisal Rapid, Relaxed, and Participatory* (1992) dan *Whose Voice Counts?: Putting The First Last*, Robert Chambers, 1997.
- http : www.mypangandaran.com/, diunduh 20 Maret
- Ahmad Fauzi, Ph.D , *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi* , (Jakarta , Gramedia Pustaka Umum , 2004)
- Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Duwi Priyanto, *SPSS Analisa Korelasi, Regresi dan Multivariate* (Yogyakarta: Gava Media, 2009)
- Duwi Priyatno, *Buku Saku SPSS Analisis Statistik Data*(Jakarta: MediaKom, 2011)
- Imam Ghozali, *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007)
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002)
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Soleman B.Toneko, *Struktur dan Proses Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta; Rajawali, t.th.)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Alfabeta, 2004)
- Sukanto Reksohadiprodjo , *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*, (Yogyakarta) BPFE UGM
- Suparmoko, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi 2001)
- T.Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro Jilid 2*, (Yogyakarta: Kanisius , 1994)
- UU No.33 Tahun 2004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Total PAD Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah	PAD Lain	Total PAD
2007	5.477	23.390	1.094	24.749	54.711
2008	6.882	27.212	1.387	11.365	46.847
2009	8.188	35.167	1.841	6.078	51.276
2010	8.148	30.786	2.311	9.267	50.512
2011	12.312	35.248	2.368	8.970	58.900
2012	17.853	32.216	1.867	7.594	59.530
2013	17.370	31.834	1.396	7.489	58.089

Lampiran 2 : Total PAD dari 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	4.412	4.146	4.316	4.211	4.489	4.012	4.251
Pangandaran	14.562	14.418	14.517	15.395	15.581	15.715	15.619
Banjarsari	3.864	3.693	3.810	3.690	3.862	3.791	3.975
Ciamis	9.261	9.765	9.782	10.914	10.951	10.015	10.215
Panjalu	4.156	3.915	4.065	4.104	4.062	4.181	4.016
Sindangkasih	5.163	5.075	5.314	5.064	5.492	5.371	5.262
Sukadana	4.975	4.461	4.477	4.206	4.061	4.017	4.190

Lampiran 3 : Pajak Hotel di 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	50.176	58.533	68.533	89.453	82.973	94.986	91.123
Pangandaran	380.013	450.246	510.269	880.154	620.102	850.795	1.223.421
Banjarsari	60.878	70.612	78.620	82.460	81.960	89.120	84.341
Ciamis	220.714	302.755	382.509	422.459	420.324	550.453	721.714
Panjalu	45.518	52.178	59.875	55.855	52.557	68.742	89.897
Sindangkasih	42.903	49.832	57.940	50.530	50.825	62.721	73.124
Sukadana	40.572	48.804	58.324	55.274	55.464	67.734	82.983

Lampiran 4 : Total Pajak Hotel Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Hotel (rupiah)
2007	1.000.527.451
2008	1.500.311.508
2009	2.165.941.801
2010	1.854.104.374
2011	3.872.308.584
2012	4.298.651.462
2013	4.851.124.572

Lampiran 5 : Pajak Restoran di 7 Kecamatan di Kabupaten Ciamis 2007-2013

Desa / Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rajadesa	58.921	50.412	69.531	82.456	89.844	94.341	99.624
Pangandaran	370.513	420.156	540.241	660.541	910.821	890.451	1.323.241
Banjarsari	61.472	75.324	81.523	80.031	90.831	89.120	84.930
Ciamis	210.434	310.321	375.501	492.124	452.523	590.823	751.512
Panjalu	46.731	53.431	55.513	52.453	62.421	61.531	92.421
Sindangkasih	45.124	51.803	57.910	55.451	50.462	63.124	75.432
Sukadana	44.124	49.812	59.344	56.221	55.424	65.234	85.123

Lampiran 6 : Total Pajak Restoran Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Restoran (rupiah)
2007	1.123.748.822
2008	1.604.123.190
2009	2.401.237.242
2010	1.950.732.123
2011	4.078.572.123
2012	4.498.321.511
2013	4.801.112.345

Lampiran 7 : Rata-rata penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ciamis 2007-2013

No	Pajak Daerah	Rata-Rata Dalam Rp	Rata-Rata dalam %
1	Pajak Hotel dan Restoran	2.878.629.714	37,7
2	Pajak Hiburan	4.152.588.220	54,08
3	Pajak Reklame	348.993.710	5,351
4	Pajak Penerangan Jalan	93.043.000	1,260
5	Pajak Bahan Galian Gol C	14.518.010	0,280
6	Pajak ABT dan AP	46.361.379	0,628
7	Pajak Parkir	103.470.900	1,290
8	Tunggakan Pajak	17.485.780	0,212
9	Denda Pajak	49.000	0,000
Total		7.653.128.619	100,000

Lampiran 8 : Nilai kontribusi (%) Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak hotel (rupiah)	Total PAD	Kontribusi (%)
2007	1.000.527.451	54.711.000.000	0,018287501
2008	1.500.311.508	46.847.000.000	0,032025776
2009	2.165.941.801	51.276.000.000	0,04224085
2010	1.854.104.374	50.512.000.000	0,036706216
2011	3.872.308.584	58.900.000.000	0,065743779
2012	4.298.651.462	59.530.000.000	0,072209835
2013	4.851.124.572	58.089.000.000	0,083511931

Lampiran 9 : Nilai kontribusi (%) Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak restoran (rupiah)	Total PAD (rupiah)	Kontribusi (%)
2007	1.123.748.822	54.711.000.000	0,020539724
2008	1.604.123.190	46.847.000.000	0,034241748
2009	2.401.237.242	51.276.000.000	0,046829652
2010	1.950.732.123	50.512.000.000	0,038619182
2011	4.078.572.123	58.900.000.000	0,069245707
2012	4.498.321.511	59.530.000.000	0,075563943
2013	4.801.112.345	58.089.000.000	0,082650973

Lampiran 10 : Nilai Multiplier (%) Pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak Hotel (rupiah)	Multiplier	Total PAD
2007	1.000.527.451	-0,063553415	54.711.000.000
2008	1.500.311.508	0,15028907	46.847.000.000
2009	2.165.941.801	0,408164171	51.276.000.000
2010	1.854.104.374	0,240606129	50.512.000.000
2011	3.872.308.584	0,676734727	58.900.000.000
2012	4.298.651.462	-0,383395633	59.530.000.000
2013	4.801.124.572		58.089.000.000

Lampiran 11 : Nilai Multiplier (%) Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis 2007-2013

Tahun	Pajak restoran (rupiah)	Multiplier (%)	Total PAD (rupiah)
2007	1.123.748.822	-0,0610852	54.711.000.000
2008	1.604.123.190	0,17997608	46.847.000.000
2009	2.401.237.242	0,58966639	51.276.000.000
2010	1.950.732.123	0,25367668	50.512.000.000
2011	4.078.572.123	0,66626887	58.900.000.000
2012	4.498.321.511	-0,2101255	59.530.000.000
2013	4.801.112.345		58.089.000.000



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MUHAMMAD SIDIK SURYADI, anak laki-laki dari pasangan Sarman dan Amini, kelahiran Jakarta, 21 Oktober 1993, merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Ia bertempat tinggal di Perumahan Harapan Baru 1, Bekasi Barat, Bekasi.

Peneliti memulai pendidikan pada tingkat sekolah dasar di SD Negeri Kota Baru IX selama 6 tahun dan dilanjutkan dengan memasuki SMP Negeri 236 Jakarta selama 3 tahun selanjutnya menjajaki pendidikan yang lebih tinggi di SMA Negeri 83 Jakarta hingga lulus dalam waktu 3 tahun dan selanjutnya memasuki bangku perkuliahan dengan menjadi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Koperasi Jurusan Ekonomi & Administrasi UNJ.

Selama perkuliahan, peneliti aktif menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan FE sebagai staf Departemen Infokom (2011/2012).

Peneliti juga pernah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat Daerah DKI Jakarta pada bagian Keuangan dan melakukan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) di SMA Negeri 9 Jakarta